

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RPJM-Des
DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN TANGGULANGIN
KABUPATEN SIDOARJO**

**COMMUNITY PARTICIPATION IN COMPILATION OF VILLAGE MID-
TERM DEVELOPMENT PLANS (RPJM-Des) IN KEDUNGBANTENG
VILLAGE TANGGULANGIN DISTRICT SIDOARJO REGENCY**

Halimatus Sa'diyah¹, Ilmi Usrotin Choiriyah²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo

E-mail: halimatussadiyyah147@gmail.com

Dikirim 5 Januari 2024, Direvisi 12 Maret 2024, Disetujui 29 Maret 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan, dan informan dipilih dengan metode purposive sampling. Data diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara dengan responden yang relevan, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang mencakup buku, artikel, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des). Hasil dari penelitian tentang partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini menunjukkan bahwa; Pertama, Indikator Partisipasi dalam tahapan perencanaan masih belum optimal, dimana dari beberapa rapat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Kedungbanteng kurang dari 50% tingkat kehadiran masyarakat. Kedua, indikator Partisipasi dalam tahapan pelaksanaan cukup optimal, baik dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik yang dilaksanakan desa kedungbanteng. Ketiga, indikator partisipasi dalam tahapan pemanfaatan juga sudah cukup optimal, karena sudah banyak masyarakat desa kedungbanteng yang terbantu dengan program dan pembangunan yang dilaksanakan desa, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Kata Kunci : Partisipasi, Penyusunan, RPJM-Des..

Abstract This research aims to identify the level of community participation and involvement in the preparation of the Village Medium Term Development Plan (RPJM-Des) document in Kedungbanteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. In this research, qualitative methods were used, and informants were selected using a purposive sampling method. Data was obtained through three data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Primary data was collected from observations and interviews with relevant respondents, while secondary data came from literature studies which included books, articles, scientific journals and documents related to the Village Medium Term Development Plan (RPJM-Des). The results of research on community participation or involvement in the preparation of the Village Medium Term Development Plan (RPJM-Des) document in Kedungbanteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency show that; First, the participation indicators in the planning stage are still not optimal, where from several meetings held by the Kedungbanteng village government, less than 50% of the community's attendance rate. Second, the participation indicators in the implementation stages are quite optimal, both in the implementation of physical and non-physical development carried out in Kedungbanteng village. Third, the indicators of participation in the utilization stage are also quite optimal, because many people in Kedungbanteng village have been helped by the programs and development carried out by the village, both physical and non-physical development.

Keywords: Participation, Preparation, RPJM-Des.

PENDAHULUAN

Pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah keinginan atau kehendak yang berlangsung secara terus menerus untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan menyeluruh dalam berbagai aspek [1]. Menurut Husein Umar (2004:8) Pembangunan dapat dipahami sebagai usaha menuju perubahan yang lebih baik berdasarkan norma yang ada melalui pendayagunaan sumber daya[2]. Pembangunan negara dapat dikatakan baik jika menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, kemudian dilaksanakan menjadi sebuah aturan atau kebijakan otonomi daerah dimana peraturan atau kebijakan tersebut merupakan hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan dan kepentingan pemerintahan daerahnya sesuai UU No. 23 tahun 2014[3].

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur mengenai tata cara perencanaan pembangunan nasional, penekanan pada pentingnya melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, baik dalam penyusunan dokumen RPJM-Des maupun RKP-Desa[4]. Selain itu, Undang-Undang terkait pemerintahan daerah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta menekankan pentingnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pentingnya peraturan seperti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga mencerminkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di desa[5].

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan sebuah dokumen yang merinci kebijakan pembangunan desa untuk periode 6 tahun. Dokumen ini dibuat dengan mempertimbangkan visi dan misi kepala desa dan melibatkan seluruh komunitas desa dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebang-Desa). Di dalamnya terdapat peraturan dan ketentuan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang mencakup berbagai bidang. Dokumen RPJM-Des digunakan sebagai panduan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014[6].

Desa Kedungbanteng terletak di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dengan luas wilayah mencapai 149,66 hektar. Desa ini terdiri dari satu dusun, empat RW, dan sembilan RT, dengan populasi penduduk sebanyak 3086 orang. Sesuai dengan Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 03 Tahun 2022 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Dalam konteks ini, UNDP (United Nations Development Programme) menguraikan 10 prinsip good governance yang bertujuan agar tercapainya perencanaan pembangunan yang baik efektif dan efisien[7].

Untuk mencapai perencanaan pembangunan desa Kedungbanteng yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterlibatan aktif masyarakat merupakan suatu keharusan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Kedungbanteng. Sesuai dengan Peraturan

Desa Kedungbanteng Nomor 3 Tahun 2022 mengenai RPJM-Des Desa Kedungbanteng tahun 2023, terdapat sejumlah masalah prioritas yang harus diatasi oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.

Prioritas masalah yang disusun dalam RPJM-Des Desa Kedungbanteng Tahun 2023 di berbagai bidang, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa hingga bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak, merupakan permasalahan yang cukup kompleks sehingga apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak pada timbulnya permasalahan yang lebih besar yang akan mengancam kesejahteraan masyarakat Desa Kedungbanteng.

Menurut Ericson dalam Slamet (1993) terdapat 3 indikator partisipasi masyarakat 1. Partisipasi pada tahapan perencanaan. 2. Partisipasi pada tahapan pelaksanaan. 3. Partisipasi pada tahapan pemanfaatan[8]. Dengan tujuan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif efisien dan sesuai dengan prioritas masalah yang disusun dalam RPJM-Des dan RKP-Desa Kedungbanteng. Dimana penyusunan dokumen RPJMDes dan RKP-Desa, Desa Kedungbanteng nyatanya masih belum maksimal dibuktikan dengan rendahnya kehadiran peserta rapat penyusunan RPJM-Des Tahun 2022.

Tabel 1. Daftar Hadir Rapat Penyusunan RPJM-Des 2022-2028 Di Desa Kedungbanteng

NO	NAMA	UNSUR JABATAN
1	Sugianto	Gapoktan
2	Sujono	Tokoh Masyarakat
3	Bayu Dwi M	LPM
4	S. Badiatul	RT 01
5	Ismaimunah	BPD
6	M.Sidiq	RT 09
7	Suyanto	RW 08

8	Asroful	RT 04
9	Ikhwan	RT 02
10	Bukhori M	RW 03
11	Nurul Lailah	PKK
12	Miftachur R	RT 09
13	Komari	BPD
14	Siti Rokhimah	Kader
15	Nur Kh Umah	Kader
16	Tahmimah	TPQ
17	Nurul H	Kader
18	Alfiyah	PKK
19	Hj.iim	RT 02
20	Rijalui M	RT 05
21	Suwito	Tokoh Masyarakat
22	Sudarmaji	RW 04
23	Nikmatul W	RA Aisyiyah 04
24	Heru S	BUMDES
25	Luqman Arif	Karang Taruna
26	Syaikhur R	RT 08
27	Nurul R	Sekdes
28	Suwanto	Tokoh Masyarakat
29	Qurotul Aini	Perangkat
30	Tabiin	RT 03
31	Haqqi	BUMDES
32	Muammal H	BPD
33	Mulyadi	RT 06
34	Dian Amri	Kaur Keuangan
35	Ainun Jariyah	RT 07

Sumber: Dokumen Desa Kedungbanteng Tahun 2022

Dari 70 total undangan yang telah di sebar dan bagikan, nyatanya hanya setengah yang menghadiri rapat penyusunan RPJM-Des yakni sebanyak 36 orang, sehingga usulan terkait kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya bisa tersampaikan karena rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam penyusunan RPJM-Des Desa Kedungbanteng.

Adapun Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji penelitian saat ini terkait Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pertama penelitian yang dilakukan oleh Widiatmoko, dkk. (2022) yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027 Di Desa Cepedak Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo". Yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara, observasi dan dokumentasi serta Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan Masyarakat pada penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Cepedak Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sudah optimal. Terbukti dengan penggunaan indikator seperti: aspek suara (voice), aspek akses, aspek control. Namun pada indikator aspek akses masih kurang karena tidak melibatkan masyarakat perempuan. Persamaan pada penelitian sebelumnya yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif serta membahas tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya menggunakan teori Eko (2004) sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori Ericson dalam Slamet (1993).

Selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh K. Aji, (2022) yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang". Yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan *purposive sampling*, serta menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten

Karawang sudah optimal. Terbukti dengan penggunaan indikator seperti: Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, Partisipasi dalam evaluasi. Persamaan pada penelitian sebelumnya yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif serta sama-sama membahas partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah berfokus pada pembangunan desa sedangkan penelitian saat ini berfokus pada penyusunan RPJM-Des.

Ketiga, yakni penelitian oleh Arifandy Setyo Nugroho (2021) yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung". Dimana pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJM-Des Di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung cukup optimal. Dibuktikan dengan penggunaan indikator seperti: Usia, Jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, waktu domisili. Persamaan pada penelitian sebelumnya yakni sama menggunakan metode kualitatif serta membahas partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah memakai teori Holil (1980:8). Sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori dari Ericson dalam Slamet (1993).

Pada kenyataannya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJM-Des di Desa Kedungbanteng masih belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat Desa Kedungbanteng, kurangnya sosialisasi serta pemahaman masyarakat Desa tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM-Des.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih tempat

penelitian di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan serta partisipasi masyarakat Desa Kedungbanteng dalam Penyusunan (RPJMDes) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo".

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dalam menginvestigasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM-Des di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memenuhi kriteria serta relevan dengan penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen terkait RPJM-Des. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan RPJM-Des dengan merujuk pada tiga indikator partisipasi: Partisipasi pada tahapan perencanaan, partisipasi pada tahapan pelaksanaan, dan partisipasi pada tahapan pemanfaatan. Analisis data kualitatif mengikuti pendekatan interaktif Miles & Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan[9].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM-Des) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM-Des di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teori dari Ericson dalam Slamet (1993), mengenai Partisipasi pada tahapan perencanaan, partisipasi pada tahapan pelaksanaan dan partisipasi pada tahapan pemanfaatan.

1. Partisipasi pada tahapan perencanaan (*Idea Planing Stage*)

Partisipasi dalam tahapan perencanaan dapat diartikan sebagai keterlibatan atau partisipasi individu dalam tahap penyusunan rencana, bagaimana strategi atau cara dalam menyusun rencana dan program pembangunan, serta rincian rencana keuangan pada proyek. Dimana Masyarakat ikut terlibat dengan cara memberikan pendapat maupun saran, melalui diskusi yang telah di adakan[10]. Sondang P. Siagian (1994:108) mengemukakan perencanaan adalah proses pemikiran dan keputusan yang di lakukan secara matang dari berbagai hal yang di kerjakan di waktu yang akan datang untuk mencapai semua tujuan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nurul Rohman sebagai Sekretaris Desa sekaligus ketua tim penyusun RPJM-Des menjelaskan bahwa Urutan kegiatan dalam penyusunan RPJM-Des berupa penyebaran undangan rapat pembentukan tim, rapat jaring aspirasi atau usulan dan rapat pengesahan dokumen RPJM-Des.

Sebelum disusunnya Dokumen RPJM-Des. Pemerintah Desa bersama masyarakat desa Kedungbanteng mengadakan beberapa kali rapat atau pertemuan, salah satunya yakni rapat MUSDES atau Musyawarah Desa perihal permasalahan yang akan dibahas pada rapat ini berupa: Pembentukan tim Penyusun dokumen

RPJM-Des serta tanya jawab seputar permasalahan terkait RPJM-Des.

perwakilan Masyarakat untuk menyampaikan usulan.

Tabel 2. Struktur Tim Penyusun RPJM-Des Desa Kedungbanteng

NO	NAMA	JABATAN
1	Budiono	Penanggung Jawab
2	Ismail	Pengesahan
3	Nurul R	Ketua Tim
4	Bayu Dwi	Sekretaris Tim
5	Dian Amri	Anggota Tim
6	Qurrotul A	Anggota Tim
7	Heru S	Anggota Tim
8	Suwono	Anggota Tim
9	Sugianto	Anggota Tim
10	Luqman A	Anggota Tim
11	Hj. Chusnul	Anggota Tim
12	Nurul Laila	Anggota Tim
13	Tabiin A	Anggota Tim

Sumber: Buku RPJM-Des Desa Kedungbanteng Tahun 2022

Gambar diatas merupakan struktur tim penyusunan dokumen RPJM-Des yang terdiri dari seluruh perwakilan masyarakat Desa Kedungbanteng. Tujuan dari pembentukan tim RPJM-Des untuk mempermudah merancang rencana pembangunan desa serta menjangring aspirasi dan usulan masyarakat tentang RPJM-Des di Desa Kedungbanteng

Setelah tim penyusun RPJM-Des terbentuk, pemerintah Desa Kedungbanteng Kembali melaksanakan rapat, yakni rapat jaring aspirasi atau usulan, dimana kegiatan ini bertujuan untuk menampung masukan, kritik dan saran dari Masyarakat. Dalam rapat tersebut biasanya tim penyusun RPJM-Des memberikan kesempatan kepada seluruh



Gambar 1. Pelaksanaan Rapat Jaring Aspirasi Atau Pengumpulan Usulan

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng Tahun 2022

Gambar diatas merupakan kegiatan pelaksanaan rapat jaring aspirasi atau pengumpulan usulan masyarakat, dimana tujuan dari rapat tersebut adalah agar usulan-usulan dan pendapat Masyarakat dapat tertampung. Sehingga kebutuhan Masyarakat dapat terpenuhi, serta pembangunan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi Masyarakat Desa Kedungbanteng.

Setelah pelaksanaan rapat jaring aspirasi masyarakat dan usulan-usulan masyarakat telah tertampung, selanjutnya tim penyusun RPJM-Des melakukan penyusunan skala prioritas masalah atau Menyusun urutan kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana hal ini bertujuan menentukan prioritas kegiatan yang akan dikerjakan terlebih dahulu.

Setelah tersusunnya prioritas masalah pemerintah desa Kedungbanteng kembali melakukan rapat, yakni rapat pengesahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des). Adanya rapat ini merupakan bentuk telah terselesaikannya penyusunan Dokumen RPJM-Des Desa Kedungbanteng.

Tabel 3. Daftar Hadir Rapat Penetapan Dan Pengesahan Dokumen RPJM-Des Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

NO	NAMA	UNSUR ATAU JABATAN
1	Nurul Lailah	PKK
2	Ismaimunah	BPD
3	Mulyadi	RT 06
4	Ikhwan	RT 02
5	Asroful	RT 04
6	Djuproni	RW 01
7	Miftachur R	RT 09
8	Sudarmaji	RW 04
9	Hariyanto	RT 03
10	Didik F	Kasun
11	Dian Amri	Kaur Keuangan
12	Alfiyah	PKK
13	Abdus Salam	PLD

Sumber: Dokumen Desa Kedungbanteng Tahun 2022

Tabel diatas merupakan daftar hadir pada rapat penetapan dan pengesahan dokumen RPJM-Des Desa Kedungbanteng. Selain rendahnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam Rapat Penyusunan RPJM-Des rendahnya partisipasi masyarakat juga di tunjukkan dalam Rapat Penetapan dan Pengesahan RKP-Desa Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Setelah penyusunan Dokumen RPJM-Des selesai, selanjutnya pemerintah desa melakukan penyusunan terkait Dokumen RKP-Desa. RPJM-Des berbeda dengan RKP-Des, RPJM-Des berisi kebijakan dan peraturan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa. Sedangkan RKP-Desa memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa untuk mencapai tujuan serta visi-misi desa.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dian Amri Prihatin selaku kaur keuangan sekaligus salah satu anggota tim penyusun RKP-Desa menjelaskan bahwa Setelah penyusunan RPJM-Des selesai, dilanjutkan dengan penyusunan RKP-Desa yang di dahului dengan pembentukan tim penyusun dokumen RKP-Desa, di lanjutkan dengan penentuan prioritas program Pembangunan selama jangka waktu 1 tahun berdasarkan dokumen RPJM-Des yang dijadikan sebagai acuan.

Jika dokumen RPJM-Des merupakan perencanaan pembangunan unuk jangka waktu 6 tahun, sedangkan dokumen RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM-Des untuk periode 1 tahun. Penyusunan RKP juga didahului dengan dengan pembentukan tim penyusun, sama hal nya dengan dokumen RPJM-Des.



Gambar 2. Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES)

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng Tahun 2022

Gambar diatas merupakan kegiatan rapat dalam rangka pembentukan tim penyusun dokumen RKP- Desa disebut dengan Musyawarah Desa (MUSDES), rapat ini dihadiri oleh perwakilan Masyarakat dan pemerintah desa. Rapat pembentukan tim penyusun RKP-Desa.

Tim penyusun RKP-Desa biasanya terdiri dari Pembina yang dijabat oleh kepala desa, ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, dalam hal ini dijabat oleh sekretaris desa, yang ditentukan langsung oleh ketua tim penyusun RKP-Desa dimana dalam hal ini dijabat oleh perwakilan unsur LPMD.

Tabel 4. Struktur Tim Penyusun Dokumen RKP-Desa Kedungbanteng 2023

NO	NAMA & JABATAN	PERWAKILAN
1	Nurul R (Ketua)	Sekretaris Desa
2	Bayu D (Sekretaris)	LPMD
3	Sugianto (Anggota)	Pengusaha
4	Tabi'in A (Anggota)	RT
5	Istafudin (Anggota)	Tokoh Masyarakat
6	Luqman A (Anggota)	Karang Taruna
7	Dian A(Anggota)	Perangkat Desa

Sumber: RKP-Desa Kedungbanteng Tahun 2023

Tabel diatas merupakan struktur tim penyusun (RKP-Desa) Desa Kedungbanteng Tahun 2023, sama halnya dengan tim penyusun RPJM-Des yang mana anggota timnya dipilih dari berbagai perwakilan Masyarakat desa.

Setelah tim penyusun RKP-Desa ini terbentuk, maka tim akan menyusun prioritas program dan pembangunan desa. Dimana prioritas program serta pembangunan yang telah disusun dalam RKP-Desa ini merupakan kegiatan yang dianggap sebagai kebutuhan utama, dikarenakan apabila tidak didahulukan akan menimbulkan masalah baru.

Tabel 5. Prioritas Program Pembangunan Desa 2023

NO	Prioritas Program Pembangunan Dalam Bidang	Kegiatan Dan Program Pembangunan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a. Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur Desa b. Peningkatan kualitas pelayanan Desa c. Program legilasi desa d. Pembaharuan data kependudukan e. Penganggaran siltap dan operasional Desa f. Pemberian insentif kelembagaan Desa

Sumber: Buku Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kedungbanteng

2	Bidang Pembangunan Desa	a. Program pelayanan-pelayanan dasar Kesehatan b. Program Sarana dan prasarana desa c. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
3	Bidang Pelatihan Masyarakat Desa	a. Pembinaan karang taruna b. Pembinaan karang werda c. Pembinaan kesenian dan budaya (pawai budaya) d. Senam Bersama masyarakat kecamatan Tanggulangin
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Program peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur desa b. Program operasional RT dan RW c. Program kerja PKK dan LKMD

Tahun 2023

Tabel diatas merupakan susunan prioritas program Pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana kegiatan dan rencana kerja pemerintah desa dalam berbagai bidang, mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa serta bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan disusunnya prioritas Pembangunan dalam RKP-Desa ini adalah terwujudnya rencana Pembangunan yang baik serta tepat sasaran, tercapainya pemanfaatan hasil desa secara maksimal, efektif dan efisien menuju desa mandiri dan sejahtera. Selain itu juga sebagai kerangka acuan bagi seluruh pemerintah desa dalam penyusunan program Pembangunan serta kegiatan tahunan yang berfungsi untuk melaksanakan visi dan misi yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari hasil wawancara dengan bapak Dian Amri Prihatin selaku kaur keuangan sekaligus salah satu anggota tim penyusun RKP-Desa Desa Kedungbanteng menjelaskan partisipasi masyarakat dalam

tahapan perencanaan memang rendah contohnya pada saat diadakan rapat RPJM-Des dan RKP-Desa hanya beberapa yang hadir.

Selanjutnya apabila prioritas program pembangunan telah tersusun dalam RKP-Desa, maka pemerintah desa beserta Masyarakat desa akan mengadakan rapat terkait pengesahan RKP-Desa. Kegiatan rapat pengesahan ini merupakan kegiatan akhir yang mana menandakan bahwa penyusunan terkait dokumen RKP-Desa telah disusun dan telah disepakati bersama.



Gambar 3. Undangan Rapat Pengesahan Dokumen RKP-Desa Tahun 2023

Sumber: Lampiran Buku RKP Desa Kedungbanteng Tahun 2023

Gambar diatas merupakan lampiran undangan rapat pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), dimana rapat ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 16 November 2022 bertempat di balai desa Kedungbanteng, topik yang akan dibahas adalah: pemaparan hasil penyusunan dokumen RKP-Desa, Pembahasan draft dan pengesahan dokumen RKP-Desa Desa Kedungbanteng.

Terkait Penelitian pada indikator partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan (*Idea Planing Stage*) ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Valentina Ayu Hastika

Hagang, dkk (2019) berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Dempat Kecamatan Nyuantan Kabupaten Kutai Barat, terkait partisipasi dalam tahapan perencanaan juga belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masyarakat hanya dilibatkan dua kali pelaksanaan rapat, setelah itu masyarakat tidak dilibatkan kembali, sehingga masyarakat kurang mengetahui perihal permasalahan, perencanaan, pelaksanaan dan kebutuhannya. yang terjadi, perencanaan yang akan dilaksanakan, serta kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

2. Partisipasi pada tahapan pelaksanaan (*Implementation Stage*)

Partisipasi pada tahapan pelaksanaan dapat diartikan dengan keterlibatan seseorang saat pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, baik berupa tenaga, uang, materi dan barang, gagasan, saran atau usulan sebagai bentuk keterlibatan pada pekerjaan atau proyek tersebut[11]. Made Pidarta dalam Siti Irine Astuti D. (2009:31-32) Menjelaskan partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam kegiatan, baik berupa mental, emosi dan fisik dengan keahlian yang dimiliki (inisiatif) serta mendukung tujuan dan tanggung jawab dengan keterlibatan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Hamdan Toyyiban selaku Kaur perencanaan Desa Kedungbanteng menjelaskan bahwa untuk Pembangunan desa sendiri ada 2 jenis Pembangunan yaitu Pembangunan fisik dan non fisik. keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sudah sangat baik karena masyarakat sudah banyak terlibat

Partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan merupakan salah satu faktor penting agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 di Desa Kedungbanteng

merupakan pembangunan dibutuhkan masyarakat desa Kedungbanteng.

Tabel 6. Program Pembangunan Desa Kedungbanteng Tahun 2023

NO	JENIS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	TAHUN
1	Jenis Pembangunan Fisik	1. Pembangunan jalan paving RT 04 dan RW 02	2023
		2. Peninggian halaman TK Dharma Wanita	2023
		3. Pembangunan Jogging Track dan Taman Bermain	2023
2	Jenis Pembangunan Non Fisik	1. Program BPNT dan PKH	2023
		2. Program Rembuk Stunting dan Posyandu	2023
		3. Pos Bindu dan Posyandu Lansia	2023
		4. Koperasi Wanita dan PKK	2023
		5. Gapoktan	2023

Sumber: Data Oleh Penulis

Tabel diatas merupakan program pembangunan tahun 2023, yang mana pembangunan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang cukup kompleks. Pembangunan Fisik dan non fisik. Pembangunan fisik merupakan beberapa pembangunan yang dapat dilihat mata seperti: Pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan bangunan (Kuncoro 2010:20). Sedangkan Wresniwiro menjelaskan bahwa Pembangunan non fisik merupakan sebuah pembangunan yang terbentuk dari kemauan Masyarakat serta memiliki kurun waktu yang cukup seperti: Upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesehatan Masyarakat.

Bapak Dian Amri Prihatin selaku Kaur keuangan juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan fisik sudah maksimal karena menerapkan sistem swakelola atau pengerjaan sendiri, dimana orang yang mengerjakannya merupakan orang yang ahli dalam bidangnya.

Kesuksesan Pembangunan desa yang telah terlaksana tidak luput dari partisipasi Masyarakat kedungbanteng itu sendiri dimana dalam tahap Pembangunan ini, Masyarakat desa kedungbanteng sudah cukup maksimal, sehingga pembangunan dapat terselesaikan dengan cepat.



Gambar 4. Pembangunan Jalan Paving, Halaman TK Dharma Wanita, Taman Bermain dan Jogging Track

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan proses Pembangunan jalan paving, peninggian halaman TK Dharma Wanita, Pembangunan taman bermain dan jogging track yang mana dalam proses pengerjaannya Masyarakat desa kedungbanteng bergotong royong dalam Pembangunannya. Selain itu Masyarakat juga menerapkan sistem Swakelola, yang artinya baik perencanaannya, pengerjaannya serta pengawasannya dilakukan sendiri oleh pelaksana.

Bapak Dian Amri Prihatin selaku Kaur keuangan juga menegaskan bahwa pembangunan fisik dan Pembangunan non fisik bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Selain Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum ada juga beberapa Pembangunan yang bersifat non fisik seperti PKH dan BPNT, Rembuk stunting, posyandu, posbindu, posyandu lansia, kopwan, gapoktan dan PKK.



Gambar 5. Penyaluran Program BPNT dan PKH

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan penyaluran bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), PKH sumber dananya berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota. Sedangkan BPNT merupakan bantuan yang berupa sembako atau beras, yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Selain program yang telah dijelaskan tadi, desa kedungbanteng juga melakukan Upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui beberapa program Kesehatan seperti rembuk stunting dan posyandu balita. Stunting merupakan gagalnya pertumbuhan yang diakibatkan kurangnya asupan gizi. Sedangkan posyandu balita adalah pelayanan pada balita.



Gambar 6. Pelaksanaan Rembuk Stunting dan Posyandu Balita

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan pelaksanaan rembuk stunting dan

pelaksanaan posyandu balita, rembuk stunting diadakan dengan tujuan penurunan dan pencegahan stunting. Sedangkan posyandu balita bertujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memberikan pelayanan kesehatan anak.

Selain program Kesehatan untuk balita, desa kedungbanteng juga melaksanakan program Kesehatan untuk orang dewasa berupa program posbindu (Pos Binaan Terpadu) yakni kegiatan monitoring dan deteksi untuk penyakit tidak menular. sedangkan posyandu lansia berupa pemeriksaan Kesehatan pemberian makanan tambahan, kegiatan olahraga berupa (senam & gerak jalan), dll.



Gambar 7. Pelaksanaan Program Posbindu Dan Posyandu Lansia

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan pelaksanaan program posbindu (Pos Binaan Terpadu) yang diperuntukan untuk orang dewasa dengan tujuan pencegahan penyakit tidak menular (PTM) dan gangguan yang diakibatkan oleh kecelakaan. Dan pelaksanaan posyandu lansia memiliki tujuan untuk meningkatkan komunikasi antara Masyarakat lanjut usia juga bermanfaat untuk menjaga kualitas hidup lansia dalam segi Kesehatan.

Koperasi Wanita Sumber Jaya dan PKK Desa Kedungbanteng juga merupakan salah satu kelompok organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

desa untuk ikut andil dalam Pembangunan Indonesia, khususnya kaum Wanita.



Gambar 8. Rapat Anggota Tahunan Kopwan Dan Pertemuan Rutin PKK

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan kegiatan rapat anggota tahunan koperasi wanita sumber jaya yang ada di desa kedungbanteng ini, tidak hanya seputar kegiatan simpan pijam saja, ada juga beberapa pelatihan dan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan pertemuan rutin PKK dan Pokja untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi.

Agar kualitas sumber daya manusia desa kedungbanteng dalam bidang pertanian dapat meningkat, dibentuklah Gabungan Kelompok tani (Gapoktan). Dimana gapoktan merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang melaksanakan usaha di bidang pertanian dengan tujuan untuk mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha dalam bidang pertanian bagi para anggota dan petani lainnya.

Gambar 9. Rapat Rutin Anggota



Gapoktan

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan kegiatan rapat rutin anggota gapoktan, dalam kegiatan tersebut biasanya akan diisi dengan diskusi terkait permasalahan yang ada, serta kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para petani desa kedungbanteng agar dapat memberikan tindakan saat tanaman pertanian diserang hama atau penyakit. Sehingga dapat terhindar dari gagal panen.

Penelitian pada indikator partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan (*Implementation Stage*) tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Shania Fonika Intan Umboh, dkk (2020) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jembatan Perkebunan Di Desa Kaneyan Kecamatan Taranan Kabupaten Minahasa Selatan sudah cukup baik, dimana masyarakat desa telah memberikan sumbangsih berupa makanan, minuman pada saat kerja bakti pembersihan daerah Sungai, serta memberikan motivasi kepada masyarakat yang terlibat langsung.

3. Partisipasi pada tahapan pemanfaatan (*Utilitazion Stage*)

Partisipasi pada tahapan pemanfaatan dapat diartikan dengan keterlibatan seseorang dalam tahap pemanfaatan sebuah kegiatan atau proyek setelah selesai di laksanakan. Keterlibatan masyarakat

pada bagian ini biasanya berupa energi atau materi yang berfungsi untuk mengelola dan merawat proyek[12]. Sumardi (2010:46) menjelaskan partisipasi adalah peran seseorang dalam tahapan kegiatan pembangunan baik dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi, serta juga terlibat dalam memanfaatkan hasilnya

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Iswatun menjelaskan bahwa dari pembangunan fisik yang dilaksanakan telah banyak dirasakan manfaatnya salah satunya yakni jalan di RT 04, RW 02 serta halaman TK Dharma Wanita yang dulunya saat musim hujan sering becek, tetapi setelah di laksanakan pembangunan sudah tidak becek.

Partisipasi dalam tahapan pemanfaatan di desa kedungbanteng tampaknya telah dimanfaatkan dengan baik dan maksimal, dilihat dari beberapa pemanfaatan jalan dan Pembangunan halaman TK Dharma Wanita yang telah di lakukan pembangunan sehingga kondisinya tampak lebih baik dan nyaman digunakan.



Gambar 10. Kondisi Jalan Dan Halaman TK Dharma Wanita Setelah Di bangun

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan peninjauan jalan yang telah selesai dilakukan Pembangunan berupa pemasangan paving block serta kondisi halaman TK Dharma Wanita yang sudah dipasang paving block. Tujuan dipasangnya paving block adalah agar pada saat musim hujan jalan dan halaman TK Dharma Wanita menjadi tidak

becek, tidak berdebu, lebih nyaman, indah, *aesthetic* dan tidak ditumbuhi rumput liar.

Pembangunan-pembangunan yang telah dijelaskan merupakan Pembangunan fisik yang meliputi sarana-prasarana pemerintah dan fasilitas umum contohnya: jalan, jembatan, irigasi, taman bermain, dll. Sedangkan Pembangunan non fisik seperti peningkatan perekonomian, Pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dll.

Hasil wawancara dengan Ibu Jumiaty salah satu warga yang menerima bantuan PKH sekaligus BPNT menjelaskan bahwa: sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH dan BPNT ini, meskipun tidak besar tapi cukup meringankan kebutuhan harian.

Bantuan PKH dan BPNT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui bantuan yang diadakan. PKH merupakan bantuan berupa uang tunai yang diberikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan BPNT merupakan bantuan beras atau bahan pokok lainnya.

Selain itu ada juga beberapa program dalam bidang Kesehatan yang dilakukan di desa kedungbanteng, mulai dari kegiatan rembuk stunting, posyandu balita, dewasa sampai lanjut usia. Manfaat dari adanya program ini adalah untuk menjaga stabilitas kesehatan Masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam bidang kesehatan.

Ibu Mukhlisah salah satu pesrta posyandu balita sekaligus peserta posbindu menegaskan banyak manfaat yang di dapat dari posyandu balita maupun posbindu, dimana dalam kegiatan posyandu balita ini dapat mengetahui kesehatan bayi. Sedangkan pada kegiatan posbindu juga dapat mengetahui kondisi kesehatan diri.

Tujuan utama diadakannya kegiatan program posyandu balita adalah untuk mencegah peningkatan angka kematian baik pada ibu dan bayi saat hamil, persalinan serta bermanfaat ini memantau

pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Sedangkan posbindu bertujuan meningkatkan peran Masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini dari faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM).

Selain posyandu balita dan posbindu, desa kedungbanteng juga memiliki program posyandu lansia. Hasil wawancara dengan salah satu peserta posyandu lansia ibu Nurul Khafidhoh menjelaskan bahwa manfaat dari adanya program posyandu lansia ini sangat banyak, salah satunya adalah dapat mengetahui kondisi kesehatan para lansia.

Tujuan utama dari adanya posyandu lansia adalah untuk membantu para lansia agar tetap sehat, baik secara fisik maupun psikis, Membantu mendeteksi penyakit pada lansia, serta sarana untuk meningkatkan interaksi sosial dengan sesama lansia sehingga dapat memperbaiki kondisi psikologisnya. Adanya Program ini di peruntukkan untuk para lanjut usia yang berumur 60 tahun keatas.

Selanjutnya, dalam pemberdayaan Perempuan desa kedungbanteng memiliki program khusus wanita, yaitu PKK dan Kopwan. PKK berfokus kepada pemberdayaan keluarga. Sedangkan Kopwan lebih fokus pada kegiatan simpan pinjam dan kegiatan pelatihan serta beberapa kegiatan lainnya.



Gambar 11. Pertemuan Anggota PKK, Kegiatan Pelatihan dan Kegiatan Outbound Anggota Kopwan

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan pertemuan rutin anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelatihan pembuatan bros dan kegiatan Outbound anggota Koperasi Wanita (Kopwan), kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kemampua, selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat tali persaudaraan dan tali silaturahmi antar sesama anggota PKK maupun anggota Kopwan desa kedungbanteng.

Sedangkan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat desa kedungbanteng di bidang pertanian, dibentuklah Gapoktan atau gabungan kelompok tani, gapoktan berfungsi sebagai media musyawarah petani yang memiliki peran akselerasi kegiatan bidang pertanian (Sunanto 2004).



Gambar 12. Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk dan Pengenalan Obat Tanaman Pertanian

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan kegiatan pembuatan pupuk dan pengenalan obat-obatan pertanian, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat desa kedungbanteng dapat melakukan Tindakan tepat apabila terjadi permasalahan terkait pertanian, serta untuk mengetahui dan memilih pupuk dan obat pertanian yang benar.

Penelitian pada indikator partisipasi masyarakat dalam tahapan pemanfaatan (*Utilitazion Stage*) tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Karmita Aji, dkk (2022) terkait partisipasi dalam tahapan

pemanfaatan sudah dapat dikatakan baik, yang dibuktikan dengan pembangunan yang telah di laksanakan seperti pengecoran aspal jalan, Pembangunan saluran drainase, penurapan jalan dan jembatan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian tentang partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari dari 3 aspek dapat di tarik kesimpulan

1. Partisipasi dalam tahapan perencanaan (*Idea Planing Stage*) masih belum optimal hal ini dibuktikan dengan beberapa kali diadakannya rapat terkait penyusunan RPJM-Des maupun RKP-Desa, tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat desa kedungbanteng masih kurang dari 50%, dari total undangan.
2. Partisipasi dalam tahapan pelaksanaan (*Implementation Stage*) sudah optimal, yang mana dibuktikan oleh beberapa pembangunan fisik oleh desa yang menerapkan swakelola atau bisa diartikan dengan pengerjaan sendiri oleh masyarakat desa kedungbanteng. Proses pelaksanaan pembangunannya memang dilakukan sendiri oleh masyarakat desa, meskipun orang yang melaksanakan pembangunan adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Sedangkan dalam pembangunan nonfisik juga sudah optimal dimana masyarakat banyak terlibat aktif dalam kegiatan PKH, BPNT, BLT serta juga aktif terlibat dalam kegiatan lain seperti Rembuk Stunting, Posyandu Balita, Posbindu, Posyandu Lansia, PKK, Kopwan, Gapoktan.
3. Partisipasi dalam tahapan pemanfaatan (*Utilitazion Stage*) juga sudah maksimal hal ini dibuktikan dengan pemanfaatan dari pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan pembangunan

halaman TK Dharma Wanita menggunakan paving *block* yang sudah dirasakan oleh masyarakat desa, dimana sebelum pembangunan jalan ini dilakukan, pada musim hujan jalan rusak parah disertai becek, akan tetapi saat ini meskipun musim hujan jalan sudah tidak becek lagi serta nyaman dilalui, selain itu sebelum pembangunan dilakukan banyak rumput liar yang tumbuh akan tetapi saat sudah dilakukan pembangunan ini, rumput liar sudah tidak tumbuh kembali. Selanjutnya dalam pembangunan nonfisik juga sudah berjalan maksimal dibuktikan dengan beberapa bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti PKH, BPNT, BLT sehingga masyarakat merasa terbantu dalam hal kebutuhan. Selain itu dengan adanya beberapa organisasi dan kegiatan seperti Rembuk Stunting, Posyandu Balita, Posbindu, Posyandu Lansia, PKK, Kopwan, Gapoktan, Masyarakat sudah merasakan manfaatnya, baik dalam bidang kesehatan, pertanian dan pemberdayaan wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- C. V. Onsu, F. M. . Tulusan, and R. Mambo, "Pengaruh Kompetensi Kepala Desa Terhadap\Keberhasilan Pembangunan Desa Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2018.
- J. Ilmiah and W. Pendidikan, "1 , 2 , 3 1," vol. 9, no. 10, pp. 595–603, 2023.
- F. Widiatmoko, E. B. Orbawati, and Y. Kurniasih, "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo," *PESIRAH J. Adm. Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 90–97, 2023, doi: 10.47753/pjap.v3i2.49.

- I. K. . Suarjaya, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung," *Widyanata*, vol. 18, no. 1, pp. 30–37, 2021, doi: 10.54836/widyanata.v18i1.602.
- S. Saraswati and N. Hariyanto, "Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)," Kementeri. Desa, Pembang. Drh. Tertinggal dan Transm. Republik Indones., vol. 4, no. 5, 2019, [Online]. Available: <https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Buku-4-Teknik-Penyusunan-RPJM-Desa.pdf>.
- Musta'ana, "Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban," *J. Ilm. Adm. Negara*, pp. 1–7.
- A. A. Rosyada, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda," *e-Journal Ilmu Pemerintah.*, vol. 4, no. 1, pp. 102–114, 2016.
- C. Maria Dimova and P. M. R. Stirk, "濟無No Title No Title No Title," pp. 9–25, 2019.
- A. Tujuan et al., "Partisipasi Masyarakat Pada Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado," *J. Adm. Publik*, vol. 6, no. 89, pp. 41–47, 2020.
- S. Fonika, I. Umboh, E. P. Manginsela, V. Richard, and B. Moniaga, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN Desa Kaneyan adalah desa yang mayoritas penduduknya adalah pekebun yang menguasai lahan pertanian pada lahan perkebunan yang relatif luas . Letak perkebunan-perkebunan tersebut berada jauh mempersingkat anggota masyarakat Desa Kaneyan melakukan perjalanan ke perkebunan dengan menggunakan alat transportasi seperti Berdasarkan uraian diatas maka," vol. 16, pp. 269–278, 2020.
- H. V. A. Astika, "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Nyuatan Kabupaten Kutai Barat," *eJournal Ilmu Pemerintah.*, vol. 7, no. 2, pp. 519–530, 2019.
- K. Aji, E. Yulyana, and E. Priyanti, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang," pp. 17–22, 2022.
- Atmojo, M. E., & Sulaksono, T. (2015). *Pendampingan Penyusunan RPJMDES Kalurahan Sendangtirto , Kecamatan B*
- Hakim, L., Studi, P., *Ilm erbah , Kabupaten. 209–215.*u, M., Publik, A., & Makassar, U. M. (2020). *PEMBANGUNAN DESA MANDIRI MELALUI PARTISIPASI 1.*
- Harisoesyanti, K. S. (2020). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengembangan Masyarakat di Komunitas Miskin Perkotaan. 2(2), 220–232.
- Mardalinda, R. (n.d.). *Juhanperak e-issn : 549–559.*
- Mokodompit, N. E., Katili, I., Ekonomi, S., Fakultas, P., & Sosial, I. (2022). *EFEKTIVITAS RPJMDes DALAM PEMBANGUNAN DI DESA HUNTU BARAT KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO 1,2). 5(2), 70–79.*
- Pangemanan, S. (2017). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1).*

- Publik, J. A. (2014). Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal ISSN: 2088-527x. 2(2), 116–145.
- Ri. A. Artisa, “Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan sustainable development goals (sdgs) desa. studi kasus: desa ciburial, kecamatan cimencyan, kabupaten bandung, jawa barat,” *Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan*, vol. 11, no. 01, p. 61, 2023, doi: 10.35450/jip.v11i01.349.
- Rompas, W. Y. (n.d.). Allen Ngongare.
- R. Saifuddin, I. Nurachmi, and D. Ferdiansyah, “Kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi lampung kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi lampung,” *Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan*, vol. 10, no. 3, pp. 309–322, 2022.
- Senuk, A., & Khairun, U. (2020). Available online at : 1, 1–24.
- Suarjaya, I. K. . (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Widyanata*, 18(1), 30–37. <https://doi.org/10.54836/widyanata.v18i1.602>

Halaman Kosong